

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Agustina, Rosa, dkk, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Cetakan Ke-1, Pustaka Larasan, Bali.
- Alting, Husein, 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Ke-4, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Ke-2, Konstitusi Press, Jakarta.
- Erawati, Elly dan Budiono, Herlien, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan Ke-1, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, Surabaya.
- Hutomo, Y.B. Sigit, 2013, *Pajak Penghasilan (Konsep dan Aplikasi)*, Cetakan Ke-6, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Ke-1, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Ke-2, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Mahfud MD, Mohammad, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-6, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, H., dan Putra, Fadillah, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia)*, Cetakan Ke-1, Averroes Press, Malang.

- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cetakan Ke-1, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Cetakan Ke-3, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-9, Mandar Maju, Bandung
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Cetakan Ke-1, Selemba Empat, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S., 2011, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., H., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian) Buku I*, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-23, Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S. W., 2009, *Kebijakan Pertanahan (antara Regulasi dan Implementasi)*, Cetakan Ke-6, Kompas, Jakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan Ke-1, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3262).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembar Negara Nomor 3263).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembar Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 3459).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3567).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 3985).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 4893).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Nomor 5916).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4914).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Karya Ilmiah:

Affandi, Buang, 2008, *Tesis*, Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Jakarta Selatan, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Baswedan, T., 2013, *Tesis*, Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah yang dibuat dihadapan Notaris, Magister Kenotariatan Sumatera Utara.

Rahmad, Edi, 2016, *Tesis*, Pembatalan Kesepakatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Disertai Pembayaran Tanda Jadi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2661K/PDT/2004), Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Siregar, Rilisia Ophira Ramadhani, 2016, *Tesis*, Pencantuman Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dilakukan Oleh Notaris di Kabupaten Sleman, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

D. Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.